

SKRIPSI

**DAMPAK RASIONALISASI ANGGARAN TERHADAP
KINERJA KELURAHAN PAPANGGO JAKARTA UTARA**

Disusun Oleh:

Nama : YOSSY NOVITRIANI

NPM : 1732050289



PROGRAM SARJANA TERAPAN ADMINISTRASI BISNIS

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

TAHUN 2022

DAMPAK RASIONALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KELURAHAN PAPANGGO JAKARTA UTARA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Terapan
dalam Administrasi Bisnis**

Disusun Oleh:

Nama : YOSSY NOVITRIANI

NPM : 1732050289

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik



**PROGRAM SARJANA TERAPAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
TAHUN 2022**

**POLITEKNIK STIALAN
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : YOSSY NOVITRIANI
NPM : 1732050289
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
**JUDUL SKRIPSI : DAMPAK RASIONALISASI ANGGARAN
TERHADAP KINERJA KELURAHAN PAPANGGO
JAKARTA UTARA**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan,

Pada 15 Juni 2022

Pembimbing



Dr. A. Rina Herawati, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta pada 29 Juni 2022

Ketua merangkap anggota,



(Anita, S.Kom., MTI.)

Sekretaris merangkap anggota,

(Muhammad Rizki, SE., MM.)

Anggota,

(Dr. A. Rina Herawati, M.Si.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : YOSSY NOVITRIANI
NPM : 1732050289
JURUSAN : Administrasi Publik :
 APN MSDMA
 Administrasi Bisnis: ABSP

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini dengan judul “Dampak Rasionalisasi Anggaran Terhadap Kinerja Kelurahan Papanggo Jakarta Utara”, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 15 Juni 2022

Penulis,



Yossy Novitriani

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul “DAMPAK RASIONALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KELURAHAN PAPANGGO JAKARTA UTARA” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Terapan Ilmu Administrasi Negara, Konsentrasi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Tersusunnya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Ibu Dr. A. Rina Herawati, M.Si. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah membimbing dan meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta yang tulus memeberikan doa dan dukungan.
2. Suami tercinta beserta anak kesayangan yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan tugas akhir.
3. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
4. Lurah Papanggo yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.
5. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian angket/kuisoner.
6. Teman-teman seperjuangan di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta khususnya teman-teman prodi angkatan 2017 yang selalu saling mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Jakarta, Juni 2022

Penulis,

Yossy Novitriani

ABSTRAK

Yossy Novitriani, 1732050289

DAMPAK RASIONALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KELURAHAN PAPANGGO JAKARTA UTARA

Skripsi, xii hlm., 70 halaman.

Pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19) telah berdampak signifikan terhadap perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja dan pembiayaan negara. Sehingga diperlukan berbagai upaya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Pemerintah harus ikut bertanggung jawab dalam pemecahan masalah yang telah terjadi secara global tersebut, hingga tahun 2021 pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih melakukan rasionalisasi anggaran terkait pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih menjadi wabah penyakit secara nasional dan secara langsung berdampak terhadap anggaran kegiatan di seluruh sektor.

Kebijakan rasionalisasi anggaran juga berdampak langsung pada penyusunan dan penyerapan anggaran DPA periode 2020 hingga mencapai sebesar 14,52% pada Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.2.224.494.373 (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk program yang lebih urgen dan memiliki nilai dampak yang lebih besar bagi masyarakat, salah satunya adalah untuk pengalokasian dana atas penanganan covid-19, khususnya di wilayah administrasi provinsi Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun teknik sampel menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan sebanyak 35 pegawai kelurahan Papanggo Jakarta Utara. Sedangkan teknik analisis menggunakan *ordinary least square analysis*.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh: (1) Penerapan kebijakan rasionalisasi anggaran di kelurahan Papanggo Jakarta Utara telah dilakukan dengan baik. (2) Pemanfaatan sumber daya terkait pegawai, dana, material, maupun teknologi informasi telah dilakukan secara efisien guna mengurangi terjadinya pemborosan anggaran. Kelurahan Papanggo Jakarta Utara dapat menunjukkan hasil output atas pelaksanaan program/kegiatan secara fisik, begitu pula dengan nilai manfaat atau benefit yang langsung dirasakan oleh masyarakat yang dipimpinnya. (3) Variabel rasionalisasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja kelurahan Papanggo Jakarta Utara. Hal ini didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi $0,000 \leq$ signifikansi α sebesar 0,05.

Kata kunci: rasionalisasi anggaran, kinerja Kelurahan Papanggo.

ABSTRACT

Yossy Novitriani, 1732050289

IMPACT OF BUDGET RATIONALIZATION ON PERFORMANCE OF *KELURAHAN PAPANGGO*, NORTH JAKARTA

Undergraduated Thesis, xii pgs., 70 pages.

The 2019 coronavirus disease (covid-19) pandemic has had a significant impact on the slowdown in the pace of national economic growth, a decline in state revenues and an increase in state spending and financing. So that various policy efforts are needed from the government to save health and the national economy. The government must take responsibility for solving problems that have occurred globally, until 2021 the central government and regional governments are still rationalizing budgets related to the COVID-19 pandemic, which until now is still a disease outbreak nationally and directly impacts the budget for activities in Indonesia. the whole sector.

The budget rationalization policy also had a direct impact on the preparation and absorption of the 2020 DPA budget, reaching 14.52% in *Kelurahan Papanggo*, North Jakarta. It can be interpreted that there is a budget savings of Rp. 2,224,494,373 (two billion two hundred twenty four million four hundred ninety four thousand three hundred and seventy three rupiah) which can be used by the central government and regional governments for more urgent programs. and has a greater impact on the community, one of which is for the allocation of funds for handling COVID-19, especially in the administrative area of the North Jakarta province. This research uses quantitative research methods. The sampling technique used purposive sampling by using as many as 35 employees of the *Kelurahan Papanggo*, North Jakarta. While the analysis technique uses ordinary least square analysis.

The results of the research are: (1) The implementation of the budget rationalization policy in the *Kelurahan Papanggo*, North Jakarta has been carried out well. (2) Utilization of resources related to employees, funds, materials, and information technology has been carried out efficiently in order to reduce the occurrence of budget waste. *Kelurahan Papanggo*, North Jakarta, can show the output results for the physical implementation of programs/activities, as well as the value of benefits or benefits that are directly felt by the people they lead. (3) The budget rationalization variable has a significant effect on the performance variable of the Papanggo sub-district, North Jakarta. This is based on the probability value of 0.000 significance significance of 0.05.

Keywords: budget rationalization, the performance of *Kelurahan Papanggo*.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORI	11
A. Tinjauan Teori	11
1. Pelayanan Publik	11
2. Kinerja Organisasi	12
3. Rasionalisasi	14
4. Kinerja Kelurahan	16
5. Rasionalisasi Anggaran	29
B. Definisi Operasional Variabel dan Indikator	34
1. Definisi Operasional Variabel	34

2. Indikator Variabel	35
C. <i>Review</i> Penelitian Terdahulu	36
D. Kerangka Berpikir	38
E. Hipotesis Penelitian	39
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 40
A. Metode Penelitian	40
B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	41
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Instrumen Penelitian	43
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 53
A. Deskripsi Obyek Penelitian	53
B. Deskripsi Responden	54
C. Hasil Pengujian Deskriptif Statistik	55
D. Hasil Pengujian Keabsahan Data	56
E. Hasil Pengujian Asumsi Klasik	58
F. Hasil Pengujian Hipotesis	60
G. Pembahasan	62
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Deskripsi	Halaman
2.1	Kerangka Berpikir	38
3.1	Desain Penelitian	41
4.1	Struktur Organisasi Kelurahan Papanggo	53
4.2	Normal P-Plot of Regression Standardized Residual	58
4.3	Heteroskedastisitas	59

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel	Deskripsi	Halaman
1.1	Rasionalisasi Anggaran Pada DPA periode 2020.....	5
1.2	Kegiatan Sebelum dan Sesudah Kebijakan Rasionalisasi Anggaran Periode 2020.....	7
2.1	Definisi Operasional Variabel	35
2.2	Indikator Variabel	35
2.3	<i>Review</i> Penelitian Terdahulu	36
3.1	Deskripsi Total Populasi di Kelurahan Papanggo	41
3.2	Jabaran Instrumen Penelitian	44
3.3	Interpretasi Koefisien <i>Cronbach's Alpha</i>	49
4.1	Klasifikasi Responden	54
4.2	Deskripsi Statistik	55
4.3	Pengujian Validitas Data	56
4.4	Pengujian Reliabilitas Data	57
4.5	Pengujian Ordinary Least Square	60
4.6	Pengujian Koefisien Determinan	62

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Deskripsi	Halaman
1	Surat Pengantar Riset	76
2	Kuesioner Penelitian	77
3	Rekapitulasi Hasil Survei	80
4	Hasil Output Statistik	81

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19) telah berdampak signifikan terhadap perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja dan pembiayaan negara. Sehingga diperlukan berbagai upaya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional yakni dengan tetap fokus pada anggaran belanja untuk kesehatan, anggaran jaring pengaman sosial serta kebijakan terkait pemulihan perekonomian nasional termasuk pemulihan bagi dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, (Humaidi, 2021:34).

Pandemi covid-19 juga berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang direfleksikan dari adanya penurunan yang cukup signifikan dari berbagai aktivitas ekonomi domestik, sehingga dampak tersebut perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan nasional, (Fitri, 2020 70).

Selama 2 tahun (2020-2021) pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi anggaran terkait pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih menjadi wabah penyakit secara nasional, sehingga secara

langsung berdampak terhadap anggaran kegiatan di seluruh sektor. Upaya rasionalisasi anggaran ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengurangi pagu anggaran di setiap dinas dengan meniadakan program kerja yang telah dicanangkan atau tetap mengadakannya dengan menggeser ke pos anggaran yang ada. Anggaran lebih difokuskan untuk dinas kesehatan untuk penanganan covid-19, sehingga dengan kebijakan atau program ini, pemerintah harus beradaptasi agar dapat melaksanakan setidaknya 90% program kerja yang telah dicanangkan, (Azhari, 2020).

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, (Afrizal, 2020:247; Azhari, 2020:1).

Menindaklanjuti keputusan tersebut pada tanggal 29 Mei 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 35/SE/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2020 dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Rasionalisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang ini dilakukan dengan harapan agar dapat mempercepat penanganan *covid-19* dan tetap menjaga daya beli masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu isi dari surat edaran tersebut adalah memberi perintah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan/pengadaan yang telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 diluar kegiatan dalam rangka penanganan *covid-19*, (Azhari, 2020:3).

Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga akan semakin meningkat. Selain bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan nasional, pemerintah juga berkewajiban untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah membutuhkan anggaran belanja pada setiap periodenya. Anggaran belanja daerah tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan dituang dalam suatu program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan.

APBD Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Mamesah, 1995:20).

Mengamati perkembangan dari situasi dan dampak dari penyebaran covid-19 pada saat ini dimana berdampak langsung terhadap realisasi anggaran belanja dan juga mempengaruhi pendapatan daerah, sehingga diperlukan kecermatan kembali terhadap penyusunan APBD sekaligus sebagai tindak lanjut dari upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi penyebaran covid-19, sehingga kebijakan rasionalisasi anggaran perlu segera dilakukan agar terciptanya efisiensi anggaran dapat dilakukan pada pos-pos program atau kegiatan yang sifatnya bisa ditunda atau ditiadakan, (Afrizal, 2020:249).

Kebijakan rasionalisasi anggaran secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni dengan menerapkan konsep otonomi daerah. Semua program yang berhubungan dengan daerah telah diserahkan secara penuh oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama anggota legislatif untuk menguatkannya dalam bentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 APBD Provinsi DKI Jakarta mengalami rasionalisasi anggaran sebesar Rp 24,72 triliun. APBD Provinsi DKI Jakarta yang semula dianggarkan sebesar Rp 87,95 triliun mengalami rasionalisasi menjadi Rp 63,23 triliun. Berikut dampak rasionalisasi anggaran pada DPA periode 2020 di Kelurahan Papanggo Jakarta Utara seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Rasionalisasi Anggaran Pada DPA Periode 2020

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Periode 2020	
Anggaran awal sebelum perubahan	Rp15,323,148,126
Anggaran setelah rasionalisasi	Rp13,098,653,753
Persentase rasionalisasi	14.52%

Sumber: DPA Kelurahan Papanggo Tahun 2020.

Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak secara langsung pada penyusunan dan penyerapan anggaran DPA periode 2020 hingga mencapai sebesar 14,52% pada Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.2.224.494.373 yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk program yang lebih urgen dan memiliki nilai

dampak yang lebih besar bagi masyarakat, salah satunya adalah untuk pengalokasian dana atas penanganan covid-19, khususnya di wilayah administrasi provinsi Jakarta Utara. Azhari (2020), Wijaya (2019), Rayadi (2017) dan Putra (2017), di dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa rasionalisasi anggaran berdampak pada ditunda dan dibatalkannya sejumlah program/kegiatan kerja yang telah direncanakan dalam SKPD di daerah dan berdampak pada menurunnya kinerja pegawai.

Adapun beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah terkait implementasi kebijakan rasionalisasi anggaran diantaranya seperti 1) mengurangi besaran belanja perjalanan dinas maksimal sebesar 50% dari total belanja perjalanan dinas pada masing-masing SKPD, 2) melakukan perhitungan kembali terhadap kebutuhan barang operasional kantor seiring dengan berkurangnya aktivitas kantor, khususnya untuk belanja ATK agar dapat dilakukan rasionalisasi anggaran minimal 20% dari pagu belanja habis pakai (ATK) yang tersedia pada DPA masing-masing SKPD, 3) melakukan rasionalisasi sebesar 15% dari belanja honorium, khususnya honorium panitia pelaksana kegiatan, honorium PNS lainnya, honorium tenaga ahli/instruktur/narasumber pada kegiatan yang mengalami penundaan atau tidak dapat dilaksanakan dan 4) memperhitungkan kembali terhadap belanja makanan dan minuman kantor yang juga berkaitan dengan beberapa poin sebelumnya, khususnya pada rekening belanja makanan dan minuman rapat agar dilakukan rasionalisasi anggaran minimal 20%. Selain itu, juga dapat melakukan pencermatan

kembali terhadap kegiatan yang tertunda atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan penyebaran covid-19, seperti kegiatan pameran, perayaan hari-hari besar, kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis dan lain sebagainya dimana sifatnya menghadirkan banyak peserta dan juga khalayak yang ramai agar dibuat rekap kegiatan dan juga besaran anggarannya.

Tabel 1.2. Beberapa Kegiatan Sebelum dan Sesudah Kebijakan Rasionalisasi Anggaran Periode 2020

No	Kode	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	%
			Kebijakan Rasionalisasi		
1	5.01.07.001	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet	Rp 243,392,880	Rp205,166,040	16%
2	5.01.07.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 82,694,524	Rp -	100%
3	5.01.07.003	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 145,691,491	Rp -	100%
4	5.01.07.004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rp 20,309,385	Rp -	100%
5	5.01.07.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Rp 53,763,445	Rp 6,470,200	88%
6	5.01.07.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 49,956,528	Rp 24,978,264	50%
7	5.01.07.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 5,716,612	Rp -	100%
8	5.01.07.008	Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi	Rp 42,240,000	Rp 42,240,000	0%
9	5.01.07.009	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 19,434,580	Rp 8,258,580	58%
10	5.01.07.010	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 49,827,140	Rp 14,077,140	72%
11	5.01.07.011	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 2,451,580	Rp 1,742,080	29%
12	5.01.07.012	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Rp 11,743,314	Rp 9,481,164	19%
13	5.01.07.013	Peyediaan Ruang Satuan PAUD Sejenis Negeri di Kelurahan	Rp 143,018,748	Rp -	100%

Sumber: DPA Kelurahan Papango Tahun 2020.

Merujuk pada laporan DPA 2020 menunjukkan bahwa adanya kebijakan rasionalisasi anggaran terbukti dapat menurunkan kinerja program/ kegiatan Kelurahan Papanggo Jakarta Utara. Perlu diketahui bahwa rasionalisasi anggaran mulai diberlakukan pada periode anggaran tahun 2020, sehingga dapat diartikan tidak ada kebijakan rasionalisasi anggaran di periode sebelum tahun 2020.

Penerapan kebijakan rasionalisasi anggaran sejak periode 2020, selain mengurangi tingkat 1) penyerapan anggaran juga 2) menurunkan kinerja organisasi kelurahan. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa kegiatan yang terpaksa harus ditunda atau bahkan dibatalkan jika kegiatan tersebut tidak mendesak untuk dilakukan atau tidak memberikan *output*, dampak atau *benefit* yang besar secara langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini secara komprehensif, holistik, analitik dan sistematis dalam bentuk Skripsi dengan judul, “Dampak Rasionalisasi Anggaran Terhadap Kinerja Kelurahan Papanggo Jakarta Utara.”

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun pertanyaan penelitian yang diangkat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
“Bagaimana dampak rasionalisasi anggaran terhadap kinerja kelurahan Papanggo di Jakarta Utara?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan terkait tujuan dan manfaat yang diangkat didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak rasionalisasi anggaran terhadap kinerja kelurahan Papanggo di Jakarta Utara.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian yang diangkat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan masukan pada teori-teori ilmu administrasi negara terutama terkait dengan pengembangan teori kinerja organisasi (dalam penelitian ini organisasi kelurahan) dan rasionalisasi anggaran. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembaca sekaligus menjadi bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang meneliti dengan topik yang sama.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa rekomendasi yang bermanfaat bagi pimpinan daerah khususnya pimpinan di Kelurahan Papanggo Jakarta Utara. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan *review* atas kebijakan-kebijakan strategis yang telah dijalankan pada tahun berjalan dan menjadi bahan kajian dalam penyusunan program dan kegiatan pada periode mendatang, khususnya yang terkait dengan kebijakan pimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi ditengah isu praktek rasionalisasi anggaran.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A